

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) TAHAP II DI KABUPATEN LAHAT (STUDI KASUS PENINGKATAN PERILAKU HIGIENIS DAN PELAYANAN SANITASI)

Andriani<sup>1</sup>, Husni Thamrin<sup>2</sup>, Dadang Hikmah Purnama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Sriwijaya

**ABSTRAK**, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program pemerintah dalam upaya peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan kondisi sanitasi yang minim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program PAMSIMAS di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskripsi dan menggunakan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Lingkungan (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari sejauhmana aspek-aspek *idealized policy*, *target group*, *implementing organization* dan *environmental factors* dapat menimbulkan perubahan-perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh program yaitu peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

Kata kunci: implementasi, PAMSIMAS, perilaku higienis, pelayanan sanitasi

**Abstract**, *The community Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) is a government program to improve hygiene behavior and sanitation services. Reality in the field shows that there are still many people who carry out open defecation (BABS) with minimal sanitation conditions. This research was conducted to find out how the implementation of the PAMSIMAS Program in Kabupaten Lahat Case Study on Improves Hygiene Behavior and Sanitation Services. The research method used is a qualitative approach with descriptive and case study design. The results showed that the implementation of Phase II Environmental Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Lahat District Case Study Improved Hygiene and Sanitation Services had not been fully implemented properly. This can be seen from the extent to which aspects of the idealized policy, target group, implementing organization and environmental factors can lead to changes as expected by the program, namely improving hygienic behavior and sanitation services.*

*Keywords: implementation, PAMSIMAS, hygienic behavior, sanitation services*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tantangan besar dalam menghadapi masalah di bidang perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat masyarakat dengan kondisi sanitasi yang minim. Masih dijumpai masyarakat yang membuang hajatnya di sungai, kebun ataupun di pekarangan rumah karena tidak mempunyai saluran pembuangan khusus untuk pembuangan air limbah rumah tangga

maupun air buangan dari kamar mandi Riset kesehatan dasar nasional (Riskesmas), 2013 menunjukkan secara nasional persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar (BAB) sendiri sebanyak 76,2 persen, milik bersama sebanyak 6,7 persen, umum 4,2 persen dan buang air besar (BAB) sembarangan sebanyak 12,9 persen. Sebanyak 46,7 persen pembuangan air limbah rumah tangga dibuang langsung ke got, tanpa penampungan 17,2 persen, menggunakan penampungan terbuka dipekarangan

sebanyak 13,2 persen, penampungan diluar pekarangan 7,4 persen, hanya 15,5 persen yang menggunakan penampungan tertutup dipekarangan dilengkapi saluran pembuangan air limbah (SPAL). Persentase penanganan sampah sebanyak 50,1 persen sampah ditangani dengan cara dibakar, hanya 24,9 persen yang diangkut petugas, 3,9 persen ditimbun dalam tanah, 0,9 persen dibuat kompos sedangkan 10,4 persen dibuang ke kali/parit/laut dan 9,7 persen dibuang sembarangan (Riskesmas, 2013). Kondisi buruknya sanitasi ini berdampak terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia tahun 2013 perkiraan jumlah kasus diare difasilitas kesehatan sebesar 5.078.830 dan yang ditangani sebesar 3.902.993 kasus atau sebesar 87,46 persen. Jumlah kejadian luar biasa (KLB) diare pada tahun 2013 sebesar 646 kasus dengan jumlah angka kematian pada kasus luar biasa diare sebesar 1,08 persen (Profil Kesehatan Indonesia, 2012). Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan yang terdiri atas kebijakan yang bersifat normatif maupun operasional.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program pemerintah Indonesia (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia dalam rangka meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) termasuk dalam salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan rekapitulasi capaian komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi Program PAMSIMAS Tahap II di Kabupaten Lahat mengindikasikan adanya permasalahan dalam tahap implementasi program komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi di beberapa desa di Kabupaten Lahat. Hal ini terindikasi dengan banyaknya jumlah desa penerima program tahun 2013 dan 2014 yang persentase dusun stop buang air besar sembarangan tetap pada level nol persen sampai dengan bulan agustus 2015, begitu

juga dengan persentase dusun adopsi cuci tangan pakai sabun, masih banyak yang nol persen.

Terjadinya kesalahan dalam penyampaian substansi program mengindikasikan adanya permasalahan komunikasi dalam pola interaksi antara implementor dan kelompok sasaran. Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa terutama dari keterwakilan wanita mengindikasikan adanya masalah dalam partisipasi masyarakat. Latar belakang pendidikan pengurus Kelompok keswadayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengindikasikan permasalahan dalam ketersediaan sumberdaya manusia serta kondisi perekonomian masyarakat penerima program yang berasal dari golongan menengah kebawah mengindikasikan adanya masalah dari faktor lingkungan.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat studi kasus peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi? Permasalahan ini dijabarkan dengan beberapa pertanyaan penelitian khusus, antara lain :

1. Bagaimana pola interaksi antara implementor dan kelompok sasaran dalam upaya penyampaian substansi Program PAMSIMAS, komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi?.
2. Bagaimana respon masyarakat (kelompok sasaran) dalam pelaksanaan komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi Program PAMSIMAS?.
3. Bagaimana ketersediaan sumberdaya manusia dalam implementasi Program PAMSIMAS komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi?.
4. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi, budaya dan dukungan pemerintah dalam implementasi Program PAMSIMAS komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi?.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan sedalam mungkin implementasi Program PAMSIMAS Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi melalui pendekatan teori dan konseptual dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola interaksi antara implementor dan kelompok sasaran dalam upaya penyampaian substansi Program PAMSIMAS, komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
1. Untuk mengetahui respon masyarakat (kelompok sasaran) dalam pelaksanaan komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanansanitasi Program PAMSIMAS.
2. Untuk mengetahui ketersediaan sumberdaya manusia dalam implementasi Program PAMSIMAS komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi, budaya dan dukungan pemerintah dalam implementasi Program PAMSIMAS komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan ilmu Multi disiplinier karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, dan ekonomi. Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidakdilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Menurut Thomas R. Dye terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

Menurut Richard Rose di dalam Winarno (2008:17) menyatakan bahwa Kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak

berhubungan dengan konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan public menurut Eystone dalam Wahab (2012:13) adalah sebagai "*the relationship of government unit to its environment*". Sedangkan menurut Wilson kebijakan publik adalah: "*The action, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the step they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*".

### Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan (Winarno. 2012). Menurut Winarno (2012) yang mengutip pendapat Rifley dan Franklin (1982) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Beberapa pakar dan ahli yang menganut pendekatan *top down* antara lain : Donald S Van Meter dan Carl E Van Horn (1975), Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Merille S Grindle (1980), dan George C Edward III (1980). Menurut Edward III (1980: 9-10), terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi atau bergerak secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain dimana keempat faktor tersebut dapat mendukung atau menghambat suatu implementasi kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn dalam Tachjan (2006:39) disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik badan-badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan social, ekonomi dan politik. Menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006), dalam proses

implementasi ada empat aspek yang perlu diperhatikan. Keempat aspek tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan yang dapat menyebabkan perubahan. Keempat aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut adalah *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization* dan *environmental factors*.

### **Implementasi Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi**

Program PAMSIMAS merupakan upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat merupakan komponen kedua dari Program PAMSIMAS. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tingkat Masyarakat, 2012, komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih seperti diare melalui:

1. Perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2. Peningkatan akses sanitasi dasar.

Perubahan perilaku menuju perilaku higienis (perilaku hidup bersih dan sehat) adalah perilaku dasar yang dianjurkan kepada masyarakat untuk dapat mencapai status kesehatan yang lebih baik. Perubahan perilaku menuju perilaku higienis terlihat dengan tercapainya 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT). Peningkatan akses sanitasi dasar adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi dasar merupakan sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah

mengenai Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi dilihat dari sejauhmana aspek-aspek *idealized policy*, *target group*, *implementing organization* dan *environmental factors* dapat menimbulkan perubahan-perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh program yaitu peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*, yang terdiri dari pihak pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat), pihak swasta (fasilitator masyarakat) dan masyarakat penerima program PAMSIMAS. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi program merupakan tahapan terpenting dalam suatu proses kebijakan. Masalah-masalah yang tidak terprediksi dalam konsep perumusan kebijakan seringkali timbul dalam implementasi kebijakan dilapangan. Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan. Proses implementasi program PAMSIMAS tahap II di kabupaten Lahat, studi kasus peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi di Desa Lawang Agung Baru Kecamatan Muara Payang dan Desa Jajaran Baru Kecamatan Kikim Barat tidak lepas dari berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan. Menurut pendapat Smith dalam Tachjan (2006:37-38), dalam implementasi kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, keempat aspek tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat aspek tersebut antara lain *idealized policy* (kebijakan yang diidealkan), *target group* (kelompok sasaran), *implementing organization* (organisasi pelaksana), dan *environmental factors* (faktor lingkungan).

#### **a. Pola Interaksi Ideal (*Idealized Policy*)**

*Idealized policy* merupakan pola-pola interaksi ideal yang telah didefinisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan (Smith dalam tachjan (2006:38)). Konteks

*idealize policy* dalam penelitian ini mengarah pada pemahaman implementor dan target sasaran akan substansi kebijakan peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Pemahaman akan substansi peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi program PAMSIMAS terkait dengan sejauh mana upaya penyampaian substansi program melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan untuk implementor (fasilitator masyarakat dan sanitarian) kepada kelompok sasaran program (Kelompok Keswadayaan Masyarakat dan masyarakat penerima program). Sosialisasi penyampaian substansi program PAMSIMAS Tahap II di Kabupaten Lahat studi kasus peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi yang telah dilaksanakan oleh tenaga fasilitator masyarakat kepada kelompok penerima belum optimal. Terjadi kesalahan informasi dalam penyampaian substansi program yang secara tidak langsung berdampak pada tingkat partisipasi target group (kelompok sasaran) sebagai penerima dan pelaksana program. Kegiatan pelatihan telah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan implementor tentang program. Hal ini menunjukkan secara umum implementasi program yang dianalisis pada aspek *idealized policy* pada kegiatan pelatihan bagi implementor program telah terlaksana, sedangkan untuk pemahaman implementor sendiri terhadap substansi program tidak hanya dipengaruhi oleh pelatihan yang telah didapat tetapi juga tergantung dari kemampuan implementor itu sendiri dalam menyerap berbagai materi yang telah diberikan.

#### **b. Respon Target group (kelompok sasaran)**

*Target group* adalah sekelompok orang/individu yang menjadi sasaran suatu kebijakan/program secara langsung yang diharapkan dapat mengadaptasi pola-pola interaksi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Pelaksanaan pendampingan pada tahap perencanaan program dimulai dari identifikasi masalah, pelaksanaan pemecuan sampai dengan proses membuat Rencana Kerja Masyarakat. Pendampingan pada tahap pelaksanaan program dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada Kelompok keswadayaan Masyarakat melalui pelatihan sambil bekerja

(on the job training). Bentuk partisipasi warga tidak hanya dalam bentuk material (uang dan barang), tetapi juga dalam bentuk pemikiran dalam tahap perencanaan.

Dalam pelaksanaan program secara umum hanya sebagian warga saja yang turut berpartisipasi, dimana sebagian besar dari keterwakilan laki-laki. Kesalahan dalam penyampaian sosialisasi awal substansi program serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan Keinginan masyarakat telah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi program. Kemanfaatan program bagi setiap desa dalam upaya peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi berbeda untuk setiap desa. Hal ini selain disebabkan oleh faktor internal *target group* itu sendiri seperti kurangnya kesadaran untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat juga disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ketidakterediaan air pada musim kemarau dimana debit air yang mengalir dari kran umum sangat kecil, bahkan ada kran umum yang mati telah menjadi penghambat implementasi peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

#### **c. Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)**

*Implementing organization* (organisasi pelaksana) merupakan badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan (Tachjan, 2006:37). Ada dua unsur di dalam *implementing organization*, yaitu unsur pelaksana (implementor) yang bertugas melaksanakan program dan organisasi, yang merujuk kepada organisasi tempat implementor melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala dalam bidang sumberdaya manusia, dimana sulit untuk mencari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam perencanaan penyediaan air bersih, dikarenakan masyarakat menghendaki air sampai kerumah-rumah warga, sedangkan didalam program bersifat hanya mendekatkan akses air bersih bagi masyarakat menjadi penghambat implementasi Program PAMSIMAS komponen peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.

#### **d. *Environmental factors* (faktor lingkungan)**

*Environmental factors* (faktor lingkungan) merupakan unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi program. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi promosi kegiatan peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi program PAMSIMAS di Kabupaten Lahat ini dapat berupa faktor ekonomi dan budaya serta dukungan dari pemerintah. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah menjadikan salah satu kendala dalam mewujudkan keberhasilan implementasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Sulit untuk dapat mengubah budaya (kebiasaan) buang air besar sembarangan, butuh waktu yang lama. Peran serta pemerintah dalam implementasi program memberikan dampak positif terhadap peningkatan perilaku higienis di Kabupaten Lahat. Dukungan Pemerintah berupa surat edaran dan fasilitasi bagi masyarakat serta pemberian Hibah Insentif Desa (HID) program PAMSIMAS bagi masyarakat yang telah berhasil menjalankan implementasi program.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi belum terimplementasi dengan baik. Kesimpulan ini dilihat dari :

1. Pola interaksi telah tersampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan Namun masih terdapat kesalahan dalam penyampaian substansi program pada sosialisasi awal di tingkat desa.
2. Masyarakat memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pendampingan dalam implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi. Namun kesalahan dalam penyampaian sosialisasi awal substansi program serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan keinginan masyarakat telah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi program.

3. Terdapat kendala dalam bidang sumberdaya manusia, dimana sulit untuk mencari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta adanya keinginan masyarakat yang tidak dapat terealisasi dalam implementasi program.
4. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah menjadikan salah satu kendala dalam mewujudkan keberhasilan implementasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Sulit untuk mengubah budaya (kebiasaan) buang air besar sembarangan yang selama ini telah dilakukan masyarakat, butuh waktu yang lama. Peran pemerintah dalam implementasi program memberikan dampak positif terhadap peningkatan perilaku higienis di Kabupaten Lahat. Adanya Hibah Insentif Desa (HID) program PAMSIMAS menjadi salah satu motivasi bagi masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### **Saran**

##### **Saran Teoritis**

Untuk lebih mengembangkan studi tentang kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi maka penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan terkait Efektifitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dalam Peningkatan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi sehingga bermanfaat bagi pelaksana program yang terkait.

##### **Saran Praktis**

1. Dalam usaha meningkatkan kemampuan implementor, perlunya diadakan sosialisasi dan pelatihan sehingga kesalahan dalam penyampaian substansi program dapat dihindari.
2. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat dengan melakukan pendekatan berupa himbauan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program.
3. Perlu adanya perencanaan program yang benar-benar mengapresiasi keinginan masyarakat.
4. Proses pemilihan pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat lebih selektif, diharapkan tugas yang diemban sesuai dengan keahlian yang dimiliki

pengurus sehingga implementasi program dapat terlaksana dengan baik.

5. Adanya upaya dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Lingkungan (PAMSIMAS) Tahap II di Kabupaten Lahat Studi Kasus Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi dalam mengajak dan memberdayakan masyarakat yaitu dengan memberikan fasilitas untuk masyarakat maupun mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan program kepada instansi yang terkait sehingga implementasi program dapat berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Creswell W, Jhon. 2009. *Research Design:Qualitative, Quantitative And Mixed Methodes Aproach*.California.: SAGE Publication. Inc.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Press.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif. Equilibrium*, vol 5 nomor 9. 1-8.
- Subarsono, A.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, (2012). *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT.Buku Seru.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

## Dokumen

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lahat 2013*.
- Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat. 2014. *Buku Putih Sanitasi 2014*
- CPMU PAMSIMAS. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tingkat Masyarakat*. Sekretariat CPMU PAMSIMAS. Jakarta.
- CPMU PAMSIMAS. 2014. *Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat Program PAMSIMAS*. Sekretariat CPMU PAMSIMAS. Jakarta.
- CPMU PAMSIMAS. 2013. *Pedoman Umum Pengelolaan Program PAMSIMAS*. Sekretariat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/ IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, tentang strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 79/KPTS/DC/2013 tanggal 21 Agustus 2013 merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/DC/2013 tentang penetapan Kabupaten/ Kota sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap II.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- CPMU PAMSIMAS.2013. *Petunjuk Teknis Hibah Insentif Desa (HID) Program PAMSIMAS*. Jakarta: Sekretariat CPMU PAMSIMAS.

## Website

- <https://www.sumsel.bps.go.id>  
<https://www.bps.go.id>  
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en>